



PUTUSAN
Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

ABDUL LATIF bin ABAS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

NURIMA binti YAKUB, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yakub, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Salahudin, Pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 1.1. H. Sale, Umur 60 tahun, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan dan tidak terdapat larangan kawin menurut hukum Islam;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Nur Faria Ningsi binti Abdul Latif, perempuan, tanggal lahir 30 April 2006 (umur 12 tahun);
 - 6.2. Ahmad Alfarizi bin Abdul Latif, laki-laki, tanggal lahir 1 September 2011 (umur 7 tahun);
 - 6.3. ;
 - 6.4. ;
 - 6.5. ;
 - 6.6. ;
 - 6.7. ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2002 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II karena jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus meliwati transportasi laut. Sehingga pernikahan Pemohon I dan

Hal 2 dari 6 Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah / Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 17 Juni 2002 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1

Hal 3 dari 6 Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Lbj tanggal 25 April 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 146 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 148. jo. Rv. Pasal 77 dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj, tanggal 12 Oktober 2018 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Hal 4 dari 6 Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah oleh RASYID RIZANI, S.HI., M.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 0
2. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 70.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 70.000,00
5. Redaksi	: Rp. 0
6. Materai	: Rp. 6.000,00

Hal 5 dari 6 Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 196.000,00

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan Perkara Nomor 117/Pdt.P/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)